

Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi Negatif Petani dan Identifikasi Tutupnya Lembaga Permodalan di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Factors Influencing Farmers' Negative Perceptions and Identification of the Closure of Financial Institutions in Koripan Village, Matesih Subdistrict, Karanganyar Regency

Phiera Aura Kartika Dunya*, Kadhung Prayoga, Joko Mariyono

Program Studi Agribisnis, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

*Email: phieraaura@gmail.com

(Diterima 17-09-2024; Disetujui 29-11-2024)

ABSTRAK

Persepsi adalah tahap di mana informasi masuk ke dalam pikiran seseorang dan berhubungan dengan pemikiran, emosi, serta pengalaman individu. Persepsi petani terhadap lembaga permodalan mencerminkan ekspektasi mereka, namun banyak petani yang merasa ragu atau memiliki pandangan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan dan mengidentifikasi penyebab berhentinya lembaga permodalan. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni - Agustus 2024 di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Metode untuk penentuan sampel penelitian menggunakan metode *proportionate random sampling* dan rumus *Isaac* dan *Michael* dengan total sampel sebanyak 257 petani serta *purposive sampling* untuk sampel dari pengelola lembaga permodalan. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang memengaruhi persepsi petani, interval skor untuk mengkategorikan tingkat persepsi negatif, dan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi penyebab penutupan lembaga tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap persepsi negatif petani serta tutupnya lembaga permodalan yang berasal dari faktor internal dan eksternal. Ketidakpercayaan, pengalaman buruk, sikap skeptis, dan rendahnya pengharapan membuat petani lebih memilih praktik lama meskipun tidak lagi optimal. Lembaga permodalan ke depan sebaiknya melakukan sosialisasi secara merata dan pengelolaannya yang diawasi langsung oleh pemerintah, serta meregenerasi anggota yang memadai dalam manajemen keuangan.

Kata kunci: faktor, lembaga permodalan, pengaruh, persepsi negatif

ABSTRACT

Perception is the stage where information enters a person's mind and is associated with their thoughts, emotions, and individual experiences. Farmers' perceptions of financial institutions reflect their expectations, yet many feel doubtful or hold negative views. This research aims to analyze farmers' negative perceptions of financial institutions and identify the causes of their closure. The study was conducted from June to August 2024 in Koripan Village, Matesih Subdistrict, Karanganyar Regency. The survey method was used in this research. The sampling method applied was proportionate random sampling using Isaac and Michael's formula, with a total sample of 257 farmers, and purposive sampling for selecting the sample from the financial institution's management. Data were analyzed using multiple linear regression to determine the factors influencing farmers' perceptions, score intervals to categorize the level of negative perception, and descriptive analysis to identify the causes of the institutions' closure. The results of this study show that all independent variables significantly affect farmers' negative perceptions both simultaneously and partially, leading to the closure of financial institutions due to internal and external factors. Distrust, bad experiences, skepticism, and low expectations lead farmers to prefer old practices, even if they are no longer optimal. In the future, financial institutions should conduct widespread socialization, have their management directly supervised by the government, and regenerate members with sufficient financial management skills.

Keywords: factors, financial institutions, influence, negative perception

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penting bagi ketahanan pangan dan perkembangan perekonomian nasional masyarakat Indonesia, dengan dinamika didalamnya yang tidak lepas dari berbagai faktor seperti lemahnya permodalan yang dimiliki oleh petani. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sendiri, diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sehingga diharapkan dapat mendorong sektor lain dapat tumbuh berkembang. Hal ini kemudian mendorong adanya kebijakan dari pemerintah untuk menyediakan alternatif permodalan baik dalam bentuk formal maupun informal yang dapat diakses oleh para petani. Desa Koripan adalah salah satu wilayah di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar yang berkontribusi dalam bidang pertanian dan terdapat penyediaan lembaga permodalan non formal yaitu Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan lembaga permodalan formal meliputi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Lembaga permodalan sendiri menjadi entitas yang berperan penting dalam memberikan dukungan keuangan termasuk kepada para petani dalam meningkatkan produksi pertaniannya dengan jenis layanan keuangan yang salah satunya adalah pinjaman modal usaha.

Realitanya, penggunaan lembaga permodalan di wilayah pedesaan belum menjadi preferensi utama karena adanya persepsi negatif petani terhadap sumber permodalan. Permasalahan seperti ini membuat petani lebih memilih untuk menghentikan usaha tani mereka sementara apabila tidak memiliki modal yang cukup dan fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Munculnya persepsi negatif ini berkaitan dengan persyaratan dan prosedur administrasi lembaga permodalan formal yang dinilai rumit dan memakan waktu lama. Menurut Aisah & Wulandari (2020) dalam penelitiannya, mayoritas petani setuju bahwa pengajuan kredit memerlukan waktu yang lama, ditambah lagi dengan pemberian jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan bermotor, dan barang berharga serta berkas fotokopi persyaratan dalam jumlah banyak, sehingga petani harus mengeluarkan biaya lebih dalam melakukan pengajuan kredit. Lembaga non formal juga tidak lepas dari persepsi negatif, karena dinilai tidak kompeten dalam kepengurusannya. Penyaluran yang dilakukan melalui kelompok dinilai tidak praktis dan kepercayaan atas kemampuan serta kejujuran pengurus kelompok tidak sepenuhnya dapat diandalkan (Rahayu, 2015).

Terbatasnya alokasi dana dari pemerintah juga turut mempersulit akses permodalan petani. Porsi penyaluran kredit pertanian dari perbankan konvensional seperti Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) hanya sebesar 1,6% dari total kredit perbankan pada bulan Desember 2017, bahkan berdasarkan data kredit BPR, persentase penyaluran kredit ke sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan terbilang cukup rendah yaitu hanya sebesar 6,1% dan dikatakan pada level stagnan $\pm 6\%$ jika dilihat dari tren dari tahun 2014 sampai dengan 2017 (OJK, 2018). Permasalahan inilah yang menyulitkan petani dalam mengakses permodalan, karena saat modal yang bersifat segera dibutuhkan, dana tersebut tidak tersedia sehingga pelaku usaha perlu mencari alternatif sumber pembiayaan lain. Oleh karena hal tersebut, salah satu lembaga permodalan di Desa Koripan menjadi tidak aktif dan akhirnya berhenti beroperasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan dan mengidentifikasi penyebab berhentinya lembaga tersebut di Desa Koripan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga permodalan dan juga dapat digunakan sebagai pertimbangan terkait preferensi petani terhadap pemilihan permodalan kedepannya. Penelitian ini memperbarui penelitian yang dilakukan oleh Deviyanti dan Wulandari (2022) dan Aisah dan Wulandari (2020) yang sebelumnya membahas preferensi petani dalam mencari sumber permodalan, tetapi belum membahas secara rinci mengenai persepsi yang dimiliki oleh petani terhadap lembaga permodalan berdasarkan kepercayaan, pengalaman, sikap, dan pengharapan yang mereka miliki. Faktor-faktor pembentuk persepsi inilah yang juga dapat memengaruhi preferensi petani dan menjadi penyebab dari berhentinya lembaga permodalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 – 11 Agustus 2024 di Desa Koripan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu wilayah dengan potensi bidang pertanian yang sangat besar sehingga dijuluki “Bumi Intan Pari”. Penelitian ini akan berfokus pada wilayah Desa Koripan yang dipilih berdasarkan pertimbangan kegiatan pra survei yaitu terdapat permasalahan tersedianya

lembaga permodalan, tetapi petani tidak memilih untuk menggunakan fasilitas tersebut sehingga lembaga tersebut tidak lagi beroperasi. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei.

Dua jenis variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas yang digunakan meliputi kepercayaan, pengalaman, sikap, dan pengharapan. Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *proportionate random sampling*. Penarikan sampel dilakukan menggunakan rumus *Isaac* dan *Michael* dengan taraf kesalahan sebesar 5%. Populasi dalam penelitian ini merupakan petani yang memiliki lahan, berjumlah 778 petani sehingga jumlah sampel yang didapatkan sebanyak 257 petani. Pengambilan sampel untuk tujuan kedua penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*, di mana jumlah sampel yang digunakan sebanyak 3 orang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dari responden di Desa Koripan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan dokumen yang bersumber dari buku, penelitian terdahulu, jurnal, serta informasi-informasi lainnya terkait persepsi petani dan lembaga permodalan.

Data yang didapatkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear dengan aplikasi SPSS untuk mengetahui faktor yang memengaruhi persepsi petani, interval skor untuk mengkategorikan tingkat persepsi negatif, dan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi penyebab penutupan lembaga tersebut.

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi dalam penelitian dapat menunjukkan bagaimana pengaruh dari variabel independen meliputi kepercayaan (X1), pengalaman (X2), sikap (X3), dan pengharapan (X4) terhadap variabel dependen yaitu persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan (Y). Persamaan regresi untuk uji ini tersaji sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi petani terhadap lembaga permodalan (Skor)

X1 = Kepercayaan (Skor)

X2 = Pengalaman (Skor)

X3 = Sikap (Skor)

X4 = Pengharapan (Skor)

E = Error term (tingkat kesalahan)

a = Nilai konstanta

b = Koefisien Regresi

2. Uji Interval Skor

Metode interval skor dapat membantu pengkategorian persepsi petani ke dalam beberapa tingkatan yaitu netral, negatif, dan sangat negatif berdasarkan skor yang diperoleh dari hasil survei dan wawancara responden. Interval skor dapat dihitung secara sistematis sebagai berikut.

$$i = \frac{a - b}{k}$$

Keterangan:

i = Interval kelas

a = jumlah skor maksimum

b = jumlah skor minimum

k = jumlah kategori

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Koripan

Desa Koripan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jarak tempuh Desa Koripan ke Ibukota Kecamatan yaitu sejauh 2 km. Luas wilayah administratif dari wilayah ini mencakup 248.0350 Ha/km² yang terdiri dari 7 dusun, meliputi Dusun Koripan, Dusun Krajan, Dusun Mendalan, Dusun Ganoman, Dusun Dukuh, Dusun Balerejo, dan Dusun Gugur. Kawasan pegunungan di Desa Koripan memiliki ketinggian 500 m dari permukaan laut. Dengan suhu udara tertinggi bisa mencapai 240C dan suhu terendah mencapai 100C. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), keadaan demografi Desa Koripan jika dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.570 dengan rincian jenis kelamin laki-laki berjumlah 2.283 jiwa dan jenis kelamin perempuan berjumlah 2.287 jiwa. Pada tingkat kecamatan, jika dilihat dari aspek usia, jumlah penduduk di Kecamatan Matesih yang termasuk dalam golongan usia produktif yaitu 15 – 64 tahun sebanyak 15.657 jiwa untuk jenis kelamin laki laki, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 15.552 jiwa. Adapun jumlah murid menurut tingkat pendidikan tahun ajaran 2022/2023 sekolah negeri dan swasta yang didominasi oleh tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan total jiwa 3.789 jiwa, kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1.160 jiwa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 676 jiwa.

Potensi di Desa Koripan sendiri memang mengarah pada bidang pertanian apabila ditinjau dari kondisi geografisnya, namun hal tersebut justru berbanding terbalik jika dilihat dari sisi demografisnya. Petani masih menghadapi berbagai kesulitan dalam pengembangan usahatani, seperti halnya masalah modal untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Meskipun aksesibilitas petani terhadap pusat kecamatan bahkan lembaga permodalan sekalipun cukup dekat, tidak membuat mereka menjadikan lembaga baik PUAP, SPKP, dan BRI sebagai opsi sumber permodalan. Hal ini berkaitan dengan sisi demografis, meskipun usia produktifnya mencapai jumlah yang cukup tinggi, tetapi nyatanya pada tingkat pendidikan di wilayah ini terbilang rendah. Pendidikan yang rendah ini seringkali membatasi pengetahuan dan keterampilan petani dalam akses terhadap informasi dan teknologi pertanian modern, serta kemampuan untuk berinovasi (Kurniawan, 2020). Akibatnya, meskipun ada modal yang tersedia, efektivitas penggunaan modal tersebut bisa kurang optimal. Ini dapat menghambat upaya peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan usaha tani yang lebih maju.

2. Keadaan Infrastruktur Desa Koripan

Infrastruktur desa merujuk pada berbagai fasilitas fisik dan layanan dasar yang dapat mendukung kehidupan masyarakat serta perkembangan ekonomi lokal meliputi beberapa aspek esensial bagi keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti transportasi, telekomunikasi dan informasi, serta pertanian dan irigasi. Infrastruktur yang turut menunjang kehidupan di Desa Koripan yaitu sistem penyediaan air bersih, penerangan rumah tangga, dan jalan. Tersedia juga fasilitas kesehatan seperti ambulans, puskesmas, posyandu, serta fasilitas umum lainnya seperti pendidikan, balai desa dan pasar desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), kondisi jalur darat di Desa Koripan mudah diakses oleh masyarakat karena jenis permukaan jalan daratnya sudah menggunakan aspal dan beton sehingga dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Adapun jenis prasarana transportasi yaitu angkutan umum darat dengan trayek tetap. Selain itu, terdapat 2 menara telepon seluler dan 5 operator layanan komunikasi telepon seluler dengan kekuatan sinyal kuat serta jenis sinyal internet telepon seluler yaitu 4G/LTE, yang memudahkan masyarakat sekitar untuk mengakses informasi dari luar.

Infrastruktur yang memadai di wilayah ini, seharusnya mendukung kegiatan ekonomi termasuk pertanian. Infrastruktur transportasi yang baik dan tersedianya layanan komunikasi memungkinkan petani untuk lebih mudah mengakses baik informasi maupun layanan yang ada di Desa Koripan, bahkan Kecamatan sekalipun, seperti Bank Rakyat Indonesia dan Badan Kerjasama Antar Desa yang keduanya menyediakan layanan permodalan. Akan tetapi, petani cenderung tertutup akan adanya inovasi atau fasilitas tersebut. Umur yang masih produktif membuat petani merasa mampu mengelola usahanya sendiri dan memanfaatkan lahan pertanian sebagai perputaran uang secara maksimal untuk menghindari penggunaan dana eksternal. Hal ini didukung dengan penelitian Deviyanti dan Wulandari (2022), yang menyatakan bahwa sebagian besar sumber permodalan petani berasal dari dana pribadi karena mereka merasa sanggup mencukupi biaya usahatannya sendiri dan tidak ingin

terikat dengan pihak lain karena pinjaman serta terbebani tanggungan berat lainnya seperti administrasi yang rumit, agunan, dan sebagainya.

3. Keadaan Pertanian Desa Koripan

Berdasarkan profil desa, Desa Koripan memiliki luas wilayah yang mencapai 248.035 Ha/km² dengan kawasan pertanian sebesar 153.5805 ha. Jumlah petani yang memiliki lahan di Desa Koripan yaitu sebanyak 778 orang, sedangkan buruh tani 368 orang. Lahan seluas 114.3476 ha ini digunakan masyarakat sebagai sawah dengan jenis irigasi tersier, sedangkan sisa lahan 39.2329 ha dimanfaatkan sebagai lahan tegal untuk menanam komoditas musiman seperti durian, alpukat, dan duku atau lainnya seperti pohon sengon serta pohon mahoni. Kawasan hutan di Desa Koripan seluas 11.9650 ha dimanfaatkan masyarakat sebagai hutan konservasi dan hutan rawa. Hasil pertanian di wilayah ini meliputi padi, jagung, ketela, kacang tanah, sayuran, cengkeh, dan kelapa dengan hasil produksinya mencapai 270 ton/th. Sektor unggulan di wilayah ini yaitu buah-buahan seperti durian dan duku serta sayuran yaitu kembang kol, sawi, dan kacang-kacangan yang total produksinya bisa mencapai 15 ton/th.

Praktik bertani yang umum diterapkan oleh petani di wilayah ini adalah rotasi tanaman antara padi dan hortikultura, di mana mereka menerapkan praktik mengganti jenis tanaman yang ditanam di lahan tertentu dari satu musim tanam ke musim tanam berikutnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada input kimia. Rotasi tanaman diterapkan antara dua komoditas yaitu tanaman padi dan tanaman sayur-sayuran atau hortikultura, dengan periode tanam komoditas padi sekitar 3 – 4 bulan lalu dirotasi dengan tanaman sayur dengan periode tanam 2 – 3 bulan. Kondisi ini dapat berubah tergantung dengan bagaimana petani tersebut mengelola lahannya, bahkan ada juga petani yang menanam dengan sistem tumpang sari pada lahan skala kecil.

Desa Koripan yang memiliki kondisi geografis mendukung untuk pertanian, dari tanahnya yang subur, ketinggian ideal, iklim sejuk, dan lainnya, tidak menjamin tingginya pendapatan yang dimiliki petani untuk modal usaha tani. Hal ini juga berkaitan dengan berbagai resiko yang melekat dalam praktik pertanian, seperti perubahan iklim, serangan hama, dan penyakit tanaman. Selain itu, harga komoditas yang berfluktuasi di pasar juga turut membuat pendapatan petani tidak bisa diprediksi dengan pasti. Keterbatasan pendapatan akibat risiko-risiko tersebut kemudian membuat petani menghadapi permasalahan permodalan, sedangkan mereka juga menghindari adanya pinjaman dari pihak eksternal. Petani lebih memilih untuk meminjam ke kerabat terdekat atau bahkan menghentikan sementara usaha taninya saat modal tidak mencukupi.

Keadaan Lembaga Permodalan

Di Desa Koripan sendiri, terdapat dua lembaga permodalan yang masih beroperasi hingga saat ini, yaitu program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BRI KCP Matesih dan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang dikelola oleh BKAD Kecamatan Matesih. Kedua lembaga tersebut masih terus berjalan dan menyediakan layanan permodalan bagi petani karena pengelolaannya yang berada di bawah naungan pemerintah dan mendapatkan pengawasan langsung dalam manajemen. Namun, kedua program ini menunjukkan perbedaan dalam pelaksanaan dan dampaknya di lapangan.

1. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) adalah program simpan pinjam dari pemerintah khusus untuk kelompok perempuan yang dikelola oleh BKAD dengan tujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam di tingkat desa dan memberikan kemudahan akses usaha skala mikro. Program ini membuka jalan bagi kelompok perempuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dalam rumah tangga. Jarak antara Kantor BKAD dengan Desa Koripan sendiri yaitu 3,7 km, tidak begitu jauh dan masih mudah untuk diakses oleh masyarakat dengan kendaraan bermotor. Syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok wanita dalam pengajuan peminjaman yaitu, setiap anggota wajib melampirkan fotokopi KTP, KK, dan proposal lengkap dengan semua tanda tangan anggota. Peminjaman sendiri hanya bisa diajukan satu kali dalam satu tahun untuk setiap kelompok dan pencairannya bisa memakan waktu 2 – 3 bulan di awal pengajuan, tetapi akan semakin cepat apabila nasabah sering mengakses permodalan ke SPKP. Nominal awal peminjaman yang dapat dilakukan oleh kelompok wanita selaku nasabah sebesar Rp 1.500.000 dan dapat naik seiring waktu dengan jumlah maksimal Rp 7.000.000, tergantung dari jumlah anggota dan keaktifan mereka dalam pelaksanaan program termasuk riwayat angsurannya. Pengembalian dana ini diangsur setiap bulan dengan bunga sebesar 1% dari jumlah peminjaman. Keterlambatan pembayaran angsuran dapat berpotensi untuk diputusnya bantuan dana

kepada kelompok yang bersangkutan. Jika salah satu anggota belum memiliki uang untuk membayar angsuran, maka anggota kelompok lainnya wajib menutupi kekurangan tersebut. Jumlah kelompok perempuan di Desa Koripan yang menjadi nasabah SPKP sekarang hanya berjumlah 8 kelompok, paling sedikit di Kecamatan Matesih. Namun, untuk keberjalanannya sampai sekarang masih aktif beroperasi dan tidak ada kendala yang terjadi. Selain layanan pinjaman, SPKP juga menawarkan berbagai bentuk bantuan lainnya meliputi program pembongkaran rumah, pembongkaran kamar mandi, pemberian sembako, bahkan piknik gratis yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun bagi seluruh nasabah.

2. Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank komersial di Desa Koripan yang menyediakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat permodalan usaha dan pengembangan serta meningkatkan pembiayaan UMKM dengan suku bunga murah. Jarak antara BRI KCP Matesih dengan Desa Koripan yaitu 2,9 km yang letaknya berada di pinggir jalan besar sehingga sangat mudah diakses oleh masyarakat setempat. Nasabah dari program KUR dapat mengajukan pinjaman modal berapapun, maksimal Rp 100.000.000. Pengembalian angsurannya dikenakan bunga paling rendah kurang lebih 0,2% - 0,3%, tergantung dari frekuensi peminjaman nasabah yang bersangkutan. Semakin sering melakukan pengajuan, semakin bertambah juga bunga yang didapatkan. Tentunya terdapat beberapa persyaratan yang berlaku bagi nasabah untuk mendapatkan pinjaman tersebut, di mana calon debitur yaitu individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak, telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan, tidak menerima kredit dari perbankan lain, tidak memiliki riwayat pembayaran cicilan yang kurang baik sebelumnya, dan melampirkan syarat administrasi berupa identitas KTP dengan minimal usia 21 tahun, buku nikah (jika sudah menikah), Kartu Keluarga (KK), serta surat izin usaha. Pihak BRI kemudian akan melakukan verifikasi dan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha calon debitur. Jika semua syarat terpenuhi, pengajuan akan disetujui dan langsung dicairkan ke rekening pihak peminjam. Seluruh proses pencairan ini hanya memakan waktu sekitar 1-3 hari tergantung dari proses verifikasi.

Apabila peminjam tidak mengembalikan angsuran tepat waktu, bank akan langsung memberikan pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan untuk segera melunasi, baik melalui telepon maupun surat dan kemudian diberikan kompensasi berupa tambahan tenggat waktu. Jika dalam waktu yang ditentukan, angsuran tidak terbayarkan, maka peminjam akan mendapatkan sanksi berupa surat peringatan yang terbagi menjadi 3 tingkatan. Langkah terakhir, apabila debitur tidak melunasi angsuran pokok dan bunganya, maka pihak bank akan menyita aset sebagai jaminan bank dan tidak boleh lagi digunakan sampai nasabah membayar lunas pinjaman. Akan tetapi, dalam keberjalanannya, program KUR ini telah memudahkan para petani untuk mengajukan pinjaman. Petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya lebih untuk pemberkasan karena semua telah dilakukan secara digital dan dibantu langsung oleh para staff bank terkait. Selain itu, terdapat juga jenis KUR musiman yang diperuntukkan bagi petani atau peternak dengan beberapa pilihan jangka waktu pelunasan. Pengembalian pinjaman KUR musiman dapat dilakukan petani dalam beberapa pilihan jangka waktu, seperti 4 bulan satu kali lunas, atau 6 bulan sampai 1 tahun sekali lunas yang biasanya dipilih oleh para peternak. Tentu hal ini menjadi bentuk dukungan bagi para petani untuk mendapatkan modal secara lebih mudah mengingat pendapatan mereka yang bergantung pada masa panen usahanya.

3. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Pada sisi lain, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang menjadi salah satu lembaga permodalan non formal di Desa Koripan justru berhenti beroperasi dan tidak lagi menyediakan layanan modal akibat adanya masalah baik secara internal maupun eksternal yang tidak terselesaikan. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan fokus untuk mempercepat pengembangan usaha ekonomi produktif petani di pedesaan. PUAP di Desa Koripan sendiri mulai berdiri tahun 2015 dengan bantuan dana awal sebesar Rp 100.000.000 yang dikelola oleh Gapoktan Tani Makmur. Ketentuan peminjaman di PUAP yaitu nasabah dapat melakukan peminjaman dana sebesar Rp 2.000.000 dalam satu tahun dengan pengembaliannya bersama bunga kurang lebih 1,4%. Syarat untuk bisa meminjam modal ini terbilang mudah yaitu hanya memerlukan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja, ditambah dengan kewajiban membayar simpanan pokok satu kali sebesar Rp 100.000 saat pertama bergabung menjadi nasabah PUAP dan

simpanan wajib Rp 5.000 setiap bulannya selama statusnya masih menjadi nasabah. Pencairan dana PUAP ke nasabah tergolong cepat karena persyaratannya yang sederhana, umumnya paling lama 3 hari. Tidak ada sanksi apapun atau penyerahan agunan yang diwajibkan bagi anggota nasabah PUAP, sehingga keterlambatan dalam membayar angsuran tidak diberatkan dengan denda tambahan. Awalnya permodalan juga hanya diperuntukkan bagi anggota Gapoktan saja, tetapi karena sedikitnya peminat, akhirnya diinformasikan ke eksternal sampai total nasabah mencapai 103 orang, yang terdiri dari anggota Gapoktan itu sendiri dan juga petani di luar Gapoktan. PUAP akhirnya berhenti beroperasi pada tahun 2020 dengan RAT yang dibuat terakhir pada tahun 2019.

Karakteristik Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani di Desa Koripan yang memiliki lahan pribadi dan bukan seorang buruh tani. Jumlah responden dalam penelitian yaitu sebanyak 257 petani dari total populasi yang diperhitungkan berdasarkan metode penentuan sampel *Isaac* dan *Michael* dengan taraf kesalahan 5%, lalu dibagi secara proporsional dari 7 dusun dengan *proportionate random sampling*.

Tabel 1. Karakteristik Responden Petani Desa Koripan

No	Indikator	Jumlah	Persentase
		---org---	---%---
1	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	185	72
	Perempuan	72	28
	Jumlah	257	100
2	Usia		
	30 – 40	4	1,6
	41 – 50	61	23,7
	51 – 60	105	40,9
	61 – 70	67	26,1
	71 – 80	20	7,7
	Jumlah	257	100
3	Lama Usaha tani		
	1 – 10	61	23,7
	11 – 20	64	24,9
	21 – 30	74	28,8
	31 - 40	49	19,1
	41 – 50	9	3,5
	Jumlah		100
4	Pendidikan Terakhir		
	SD	116	45,1
	SMP/Sederajat	94	36,6
	SMA/Sederajat	42	16,4
	Diploma/S1	5	1,9
	Jumlah	257	100
5	Penghasilan per Bulan		
	> Rp500.000,00	96	37,4
	< Rp500.000,00	161	62,6
	Jumlah	257	100
6	Tanggungans Keluarga		
	<1	56	21,8
	1-3	169	65,8
	>3	32	12,5
	Jumlah	257	100

Sumber: Data Primer Penelitian, 2024.

1. Jenis Kelamin

Diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian adalah laki laki yang berjumlah 185 orang atau 72% dari total seluruhnya. Peneliti sendiri menyadari adanya perbedaan perilaku antara petani perempuan dan petani laki-laki di Desa Koripan, dimana petani dengan jenis kelamin laki-laki cenderung mengambil resiko lebih besar dalam berhutang untuk investasi yang mereka anggap dapat meningkatkan produktivitas atau keuntungan jangka panjang. Berbeda dengan petani perempuan

yang lebih berhati-hati dalam mengambil risiko, karena mereka melihat permodalan sebagai salah satu cara untuk menstabilkan ekonomi atau pemenuhan kebutuhan keluarga, sehingga mereka lebih sering mengambil pinjaman kecil yang mudah diatur dan dilunasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pengambilan keputusan oleh pria cenderung mengedepankan rasionalitas dan logika serta cepat dalam pengambilan keputusannya, sedangkan perempuan memiliki pola pikir yang lebih emosional dan penuh dengan pertimbangan yang kompleks sehingga membutuhkan waktu lama (Permatasari & Rondhi, 2022).

Berdasarkan hasil survei, beberapa petani laki-laki di wilayah ini pernah melakukan peminjaman modal ke bank komersial untuk membuka usaha lain seperti contohnya adalah usaha peternakan sebagai penunjang sektor pertanian mereka. Tidak jarang juga petani yang memutuskan untuk tetap mempertahankan modal dari sumber pribadi dan menghindari risiko ke depan karena produktivitas pertanian yang tidak pasti serta dapat berubah-ubah sesuai dengan faktor alam. Berbeda dengan petani perempuan, yang beberapa diantaranya memilih untuk melakukan pinjaman dana dengan nominal yang tidak begitu besar pada SPKP untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari termasuk pertanian di dalamnya, karena prosedur yang dianggap lebih ringan dan sederhana dibandingkan lembaga lainnya. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan perilaku antara petani apabila ditinjau dari jenis kelaminnya.

2. Usia

Mayoritas dari responden penelitian berada dalam rentang usia yang tergolong produktif. Responden didominasi oleh rentang usia 51 – 60 tahun yang berjumlah 105 orang atau 40,9% dari total keseluruhan, ditambah lagi dengan 4 orang dari rentang usia 30 – 40 tahun dan 61 orang dari rentang 41 – 50 tahun. Usia tentunya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seseorang, petani muda biasanya lebih terbuka terhadap inovasi dan berani mengambil risiko untuk menjalankan usahanya, berbanding dengan petani tua yang cenderung mempertahankan cara konvensional yang telah lama diterapkan sehingga lebih lambat menerima perubahan. Hal sesuai dengan pendapat Gusti *et al.* (2021), yang menyatakan bahwa petani berusia tua umumnya memiliki pemahaman yang relatif kurang, tetapi mampu mengenali kondisi lahan usaha taninya dengan baik.

Berdasarkan penelitian, hasil menunjukkan bahwa petani yang memiliki persepsi netral terhadap lembaga permodalan berada di rentang usia sekitar 40 – 50 tahunan. Petani dalam rentang umur tersebut lebih memungkinkan dalam berinvestasi jangka panjang karena memiliki waktu lebih banyak untuk mengembalikan pinjaman dan melihat hasil investasi mereka. Selain itu, mereka lebih terhubung dengan jaringan sosial seperti kelompok petani perempuan yang menyediakan akses ke permodalan SPKP. Petani dengan rentang umur diatas 55 tahun, memasuki umur 60 – 80 tahun, justru memiliki persepsi negatif terhadap lembaga permodalan. Petani tua akan lebih memilih untuk mengusahakan modal pribadi secara maksimal, karena ketidak pahamannya akan prosedur yang dinilai rumit, ditambah lagi dengan ketakutan mereka dalam pengembalian angsuran yang tinggi. Hal ini juga didukung dengan pendapat Satriawan *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa, umur seseorang dapat berpengaruh besar terhadap kematangan fisik dan emosional yang menentukan kesiapan dalam menerima inovasi.

3. Lama Usaha Tani

Peneliti mendapatkan hasil bahwa mayoritas responden memiliki cukup pengalaman, ditunjukkan dari banyaknya responden yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Pengalaman usaha tani dibagi menjadi tiga kategori, kurang berpengalaman (<5 tahun), cukup berpengalaman (5-10 tahun), dan berpengalaman (>10 tahun) (Apid & Sumekar, 2022). Rata-rata lama usahatani yang dimiliki oleh responden penelitian kurang lebih adalah 22 tahun, dimana usaha paling lama berada di rentang 21 – 30 tahun dengan total 74 orang atau 28,8% dari total keseluruhan. Petani yang sudah lama menekuni usaha taninya, cenderung memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam pengelolaan pertanian dan membuat mereka lebih adaptif dalam mengatasi berbagai tantangan atau resiko yang mungkin muncul selama proses bertani.

Data menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memiliki persepsi negatif terhadap permodalan. Petani yang berkecimpung lama dalam usaha tani, telah melewati banyak pengalaman tidak memuaskan terkait dengan lembaga permodalan. Petani sudah memahami bagaimana rumitnya prosedur pengajuan pinjaman pada lembaga formal, sedangkan lembaga non formal dianggap tidak dapat membantu pertanian secara menyeluruh karena keterbatasan SDM-nya. Hal ini didukung juga oleh (Fatmasari *et al.* 2015), yang menyatakan bahwa perilaku petani dapat dipengaruhi oleh banyak hal termasuk pengalaman, kompetensi penyuluh (kemampuan komunikasi, adaptasi, memahami

keinginan petani, dan berpengalaman), kompetensi kelompok tani (menyebarkan informasi, menyarankan pelaksanaan program, dan selalu bersifat jujur serta terbuka). Akan tetapi, memang terdapat sedikit responden yang memiliki persepsi netral terhadap lembaga permodalan dengan rata-rata usaha tani mereka tidak lebih dari 10 tahun. Artinya, petani yang belum lama berusahatani memang masih berpotensi untuk terbuka terhadap adanya inovasi karena belum ada dasar pengalaman yang cukup kuat untuk membentuk persepsi negatif.

4. Pendidikan terakhir

Diketahui bahwa tingkat pendidikan petani didominasi oleh lulusan SD yaitu sebanyak 116 orang dengan persentase 45,1% yang selanjutnya disusul oleh tingkat SMP/Sederajat sebanyak 94 orang dengan persentase 36,6%. Hal ini menunjukkan adanya latar belakang pendidikan yang relatif rendah, sehingga dapat memengaruhi juga kemampuan petani dalam memahami informasi dan inovasi terkait usaha tani serta pengambilan keputusan kedepannya. Rendahnya pendidikan menunjukkan bahwa kualitas SDM petani tidak memadai dalam usaha pengembangan kinerja usaha tani yang lebih baik (Kurniati, 2020). Rendahnya pemahaman yang diterima petani karena faktor pendidikan ini, kemudian ikut memengaruhi perilaku mereka dan mendasari terbentuknya persepsi.

Petani dengan pendidikan rendah kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman informasi terbaru terkait program permodalan apapun, sehingga lebih memilih untuk bergantung pada pengalaman atau mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Petani di Desa Koripan lebih memilih untuk mengusahakan dana pribadi atau meminjam kerabat terdekat meski terdapat berbagai program yang memang dirancang khusus untuk membantu ekonomi petani, seperti KUR dan SPKP. Pinjaman ini dianggap sebagai suatu beban atau ancaman dibandingkan dengan alat yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan usaha. Pada sisi lain, petani dengan persepsi netral pada penelitian ini, mayoritas menempuh pendidikan Diploma/S1 dan SMA. Petani dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berarti memiliki potensi lebih besar untuk menerima adanya inovasi karena kemampuan memahami mereka terkait dengan pengelolaan keuangan, dapat menjadikan lembaga permodalan sebagai salah satu bentuk investasi yang baik untuk meningkatkan usahanya. Hal tersebut sejalan dengan Prayoga *et al.* (2020), yang menyatakan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi akan memudahkan mereka dalam mengolah sumber daya yang dimiliki, sehingga aspek ini diharapkan dapat menjadi katalisator peningkatan mutu SDM yang dapat meningkatkan kesejahteraan di wilayah tersebut.

5. Penghasilan

Berdasarkan data, sebanyak 62,5% dari total responden memiliki penghasilan yang kurang dari Rp500.000 setiap bulannya, sedangkan 37,4% sisanya lebih dari Rp500.000 per bulan. Petani dengan penghasilan lebih tinggi mungkin memiliki akses yang lebih baik juga terhadap modal dan lembaga keuangan karena kepercayaan dirinya dalam mengambil keputusan terkait permodalan, terutama mereka dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan petani berpenghasilan rendah, yang menghindari adanya perilaku hutang karena risiko finansial yang lebih besar. Pada kenyataannya, penghasilan tidak memengaruhi perilaku petani dalam meminjam modal baik ke lembaga formal atau non formal.

Petani dengan penghasilan tinggi dan rendah, keduanya sama bergantung dengan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. Beberapa responden dengan penghasilan kurang dari Rp 500.000, bahkan memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal ke lembaga permodalan yang dikira sesuai dengan pengajuan nominal dan bunga yang disanggupi. Contohnya adalah kelompok wanita yang mengajukan pinjaman pada SPKP atau petani individu yang mengajukan ke program KUR Petani yang mendapatkan lebih dari Rp 500.000, justru belum tentu ingin memanfaatkan lembaga permodalan sebagai opsi sumber permodalan mereka. Mereka hanya menggunakan penghasilannya untuk menunjang usaha yang sudah dimiliki dan fokus di perputaran uang dalam upaya peningkatan penghasilan kedepannya.

6. Tanggungan Keluarga

Penghasilan sendiri juga berhubungan dengan tanggungan keluarga, dimana 65,8% dari responden memiliki jumlah tanggungan keluar 1-3 orang. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, maka akan memperkecil pendapatan karena biaya pengeluarannya yang juga semakin meningkat. Jumlah tanggungan keluarga dapat memengaruhi jumlah pendapatan petani apabila jumlah tanggungannya banyak tetapi tidak berperan aktif dalam pengembangan usaha tani dari berbagai sisi (Asfiati & Sugiarti, 2021). Konteks ini berarti, keputusan untuk berhutang atau

memilih sumber modal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi rumah tangga secara keseluruhan meliputi penghasilan dan pendapatan keluarga.

Berdasarkan hasil yang didapatkan peneliti, sebagian besar dari responden memiliki tanggungan keluarga, hanya 56 orang saja yang hidup sendiri dan tidak menanggung siapapun. Responden yang tidak memiliki tanggungan keluarga, tentunya memilih untuk tidak menggunakan lembaga permodalan karena merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dengan memanfaatkan produk usaha tani sebagai konsum pribadi dan juga sumber pendapatan, sedangkan keluarga dengan tanggungan mulai dari 1 sampai lebih dari 3, cenderung menghindari hutang karena tidak ingin terbebani oleh risiko tambahan yang dapat mengganggu stabilitas keuangan keluarganya.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Negatif

Faktor-faktor pengaruh persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan yaitu kepercayaan, pengalaman, sikap, dan pengharapan yang kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh keempat faktor terhadap persepsi.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.
Konstanta	2,027	0,000
Kepercayaan (X1)	0,238	0,003
Pengalaman (X2)	0,511	0,000
Sikap (X3)	0,179	0,001
Pengharapan (X5)	-0,153	0,001

Sumber: Data Primer Penelitian Diolah, 2024.

Berdasarkan hasil analisis, diketahui persamaan regresi yaitu:

$$Y = 2,027 + 0,238X1 + 0,511X2 + 0,179X3 - 0,153X4 + e$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa variabel kepercayaan (X1), pengalaman (X2), dan sikap (X3) berpengaruh positif terhadap persepsi negatif petani, yang berarti semakin tinggi nilai tiga variabel tersebut maka persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan juga akan semakin meningkat. Berbeda dengan variabel pengharapan (X4) yang berpengaruh negatif terhadap persepsi. Jika nilai variabel pengharapan meningkat, maka persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan akan semakin menurun.

1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh nilai Adjusted R-Squared sebesar 0,644 atau 64,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu kepercayaan (X1), pengalaman (X2), sikap (X3), dan pengharapan (X4) berkontribusi atas pengaruh signifikan terhadap Persepsi petani terhadap lembaga permodalan (Y) sebesar 64,4%, dan sisanya sebesar 35,6% dijelaskan oleh variabel lain. Jika R² semakin besar atau mendekati 1 maka model makin tepat, sebaliknya nilai R² yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Syarifuddin & Saudi, 2022).

2. Uji F

Berdasarkan hasil analisis data, ditunjukkan bahwa uji simultan memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti H₀ ditolak dan H₁ diterima, dimana variabel independen pada penelitian yaitu kepercayaan (X1), pengalaman (X2), sikap (X3), dan pengharapan (X4) secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh signifikan terhadap persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan (Y). Dasar pengambilan keputusan uji F yaitu, jika nilai signifikansi <0,05 maka H₀ ditolak dan H₁ diterima yang berarti setiap variabel bebas secara serempak berpengaruh terhadap variabel terikat (Purnomo, 2016).

3. Uji t

Hasil analisis uji t tersaji pada tabel 2, yang menunjukkan bahwa semua variabel independen yaitu kepercayaan (X1), pengalaman (X2), sikap (X3), dan pengharapan (X4) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan (Y), karena masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini didukung dengan pernyataan Purnomo (2016), bahwa dasar pengambilan keputusan uji t yaitu H₀ ditolak dan H₁ diterima apabila nilai signifikansi <0,05 yang berarti masing-masing variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil uji t, ditunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kepercayaan sebesar 0,003 sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi negatif petani di Desa Koripan. Petani di Desa Koripan memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap lembaga permodalan, sehingga persepsi yang terbentuk juga cenderung negatif. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya peminat peminjam SPKP yang berjumlah paling sedikit dalam satu kecamatan, meskipun program ini telah memberikan kemudahan bagi nasabahnya dan menawarkan berbagai bentuk bantuan termasuk di luar sektor pertanian, tetap tidak menjadikannya sebagai pilihan petani sebagai sumber permodalan. Menurut salah satu sumber minimnya minat wanita tani disebabkan karena ketakutan mereka menanggung kekurangan dana apabila anggota lainnya tidak dapat membayar angsuran, dan tanggung jawab sebagai ketua kelompok dinilai cukup berat karena harus mengkoordinasi antar anggota serta menutupi kekurangan kelompok apabila anggota lain tidak dapat membantu.

Variabel pengalaman menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi negatif petani di Desa Koripan. Pengalaman negatif seperti kekecewaan atau ketidakadilan dapat membentuk sikap skeptis dan prasangka. Petani di Desa Koripan merasa bahwa bantuan berupa dana yang disalurkan, hanya digunakan untuk kepentingan dan sebagian oknum tertentu saja. Sumber daya manusia dan manajemen yang tidak sesuai, menyebabkan bantuan dana tidak dialokasikan seperti yang seharusnya untuk mendukung peningkatan usaha tani bersama secara kontinyu. Pengalaman ini berkaitan dengan PUAP yang gagal mengelola perputaran keuangan senilai Rp 100.000.000, di mana dana seharusnya digunakan bersama untuk pengembangan usaha tani, nyatanya habis dan petani di desa ini bahkan belum merasakan dampaknya dalam sektor pertanian secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang belum mengetahui akan adanya bantuan modal seperti ini. Adapun pengalaman lain yang juga turut memengaruhi terbentuknya persepsi negatif yaitu KWT di Desa Koripan dulu pernah menerima bantuan dana untuk usaha perkembangan rumah bibit. Nyatanya dana tersebut tidak digunakan secara maksimal sehingga habis sebelum usahanya berkembang. Pengalaman pinjaman, adanya bunga tinggi dan agunan, kurangnya informasi, dan ketidakmampuan lembaga dalam memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan petani secara spesifik memengaruhi rendahnya aksesibilitas petani dalam menggunakan lembaga permodalan (Karyani & Akbar, 2016).

Variabel sikap menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi negatif petani di Desa Koripan. Sikap yang negatif dapat menyebabkan seseorang menilai sesuatu dengan prasangka, meski bukti menunjukkan sebaliknya. Sikap skeptis yang dimiliki oleh petani di Desa Koripan membuat mereka cenderung menutup diri dan tidak tertarik terhadap bantuan modal dari lembaga manapun. Adanya pengalaman masa lalu yang mereka alami terkait PUAP atau pinjaman lainnya telah membentuk persepsi negatif yang menutup masuknya informasi lain tentang lembaga permodalan. Petani di wilayah ini tidak lagi percaya akan bantuan berupa dana dapat bermanfaat bagi usaha tani, seperti bantuan dari Bank BRI dalam program KUR yang dinilai akan memberatkan mereka dengan rumitnya ketentuan dan persyaratan pinjaman, ditambah lagi dengan anggapan wajib menyerahkan agunan serta bunga tinggi, sehingga para petani semakin yakin untuk tidak mengambil pinjaman. Penyerapan informasi yang tidak tepat dan kurangnya edukasi terhadap petani inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan mereka terhadap suatu lembaga untuk membantu pengembangan usaha tani mereka yang kemudian menumbuhkan sikap skeptis di lingkup petani. Persepsi petani dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang terdiri dari orang tua, teman sebaya, dan masyarakat setempat karena hubungan interpersonal akan memengaruhi individu dalam pengambilan keputusan (Erliaristi *et al.* 2022).

Variabel pengharapan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berarti memiliki pengaruh terhadap persepsi petani di Desa Koripan. Pengalaman negatif yang telah dialami, akan meninggalkan jejak dalam diri seseorang sehingga membuatnya lebih pesimis atau berhati-hati dalam mengekspektasikan sesuatu. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, petani di Desa Koripan tidak memiliki harapan atau ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga permodalan apapun di masa depan. Hal ini dibuktikan dari beberapa alasan yang diberikan oleh petani, dimana mereka menyatakan bahwa bantuan dana yang diberikan tidak akan berjalan secara optimal dan merata jika kebijakan dan SDM-nya tidak diperbaharui. Petani justru lebih mengharapkan adanya bantuan produk seperti tambahan pupuk subsidi, yang secara nyata dapat membantu perkembangan usaha tani mereka secara kontinyu. Selain itu, diharapkan juga adanya bantuan penyaluran produk dalam pemasaran untuk menunjang perekonomian pertanian yang lebih kompetitif dan stabil. Harapan-harapan ini mencerminkan sikap dan ketidakpercayaan mereka terhadap lembaga permodalan, yang dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan riil para petani di lapangan.

Penyebab Tutupnya Lembaga Permodalan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa sebagian besar responden yaitu petani memiliki persepsi yang berada di kategori “sangat negatif” dengan total 156 orang, lalu kategori “negatif” berjumlah 78 orang, dan kategori “netral” yang hanya berjumlah 23 orang. Keseluruhan hasil analisis dalam penelitian telah menunjukkan bahwa persepsi negatif petani terhadap lembaga permodalan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor kepercayaan, pengalaman, sikap, dan pengharapan. Salah satu pengalaman masa lalu yang telah memengaruhi pembentukan persepsi negatif petani ini ialah permasalahan PUAP yang tidak dapat mengelola bantuan dana untuk mengembangkan usaha tani secara menyeluruh di Desa Koripan. Berhentinya permodalan non-formal ini disebabkan oleh masalah internal dan eksternal.

Dari sisi internal, kurangnya keterampilan dan kemampuan manajemen dari pengurus PUAP menjadi masalah utamanya. Pengelolaan yang seharusnya melibatkan seluruh anggota Gapoktan justru hanya dikelola oleh pengurus inti, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Gapoktan yang seharusnya berperan sebagai pusat informasi bagi petani, justru banyak mengalami kemunduran dan dalam menunjukkan adanya kategori sangat tidak baik berdasarkan eksistensinya dari persepsi petani Fardisi *et al.* (2023). Pihak penyuluh pun juga tidak aktif membantu pengawasan jalannya program ini dan hanya dilepas begitu saja. Hal ini berkenaan dengan artikel ilmiah oleh Prayoga *et al.* (2018), yang menyatakan bahwa interaksi antara penyuluh dan petani harus berlandaskan kepercayaan agar komunikasi dapat berjalan efektif dan terjadi proses adopsi inovasi. Realitanya, banyak dari kasus yang menunjukkan rendahnya intensitas tatap muka antara penyuluh dan petani sehingga menyebabkan keduanya kurang memahami satu sama lain. Penelitian lain dalam artikel ilmiah ini juga menunjukkan adanya korelasi kemampuan komunikasi terhadap kompetensi, dimana kompetensi yang dimiliki penyuluh akan berpengaruh terhadap motivasi kerja, baik penyuluh itu sendiri atau petani yang disuluh. Jika motivasi kerja rendah, maka produktivitas juga akan ikut melemah.

Hal itu kemudian diperburuk oleh minimnya koordinasi antara pengurus dan adanya kesalahan administrasi, seperti pergantian bendahara tanpa penyerahan data keuangan yang lengkap. Data keuangan yang diberikan hanya berupa list berisikan catatan nama peminjam, dusun, jumlah angsuran, total pembayaran, dan sisa pinjaman nasabah, sedangkan bendahara periode kedua ini tidak mengenal sebagian besar nasabah PUAP sehingga kesulitan untuk mencari dengan data yang tidak lengkap. Kesalahan administrasi lainnya yang semakin mempersulit pengelolaan keuangan adalah penggunaan sistem “bayar titip,” dimana nasabah menitipkan angsuran kepada pengurus terdekat, juga menyebabkan banyak kesalahan dalam pencatatan angsuran. Seharusnya setiap pembayaran atau pengangsuran langsung dilakukan ke bendahara agar nasabah dapat diberikan slip angsuran sebagai bukti. Adanya indikasi kecurangan juga ditemukan dari hasil survei yang dilakukan. Menurut responden berdasarkan hasil wawancara, informasi tentang program PUAP sudah menyebar luas di masyarakat Desa Koripan, kenyataannya banyak dari petani yang tidak mengetahui tentang adanya bantuan pinjaman modal. Petani tidak mengetahui secara jelas dan tidak merasa adanya bantuan yang pernah diberikan dalam mempermudah mereka mendapatkan permodalan. Berdasarkan informasi yang beredar di lingkup petani, disebutkan bahwa keuangan tersebut mungkin lebih banyak dialirkan untuk kepentingan pribadi dan hanya dipermudah atau disampaikan kepada orang-orang tertentu, terutama yang memiliki relasi dekat dengan pihak pengurus.

Sebaliknya, jika dilihat dari sisi eksternal, banyak nasabah yang tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab dalam membayar angsuran, sehingga menyebabkan kemacetan dalam pengembalian pinjaman. Kurangnya jumlah SDM pengurus PUAP, yang tidak sebanding dengan jumlah peminjam, turut mempersulit proses pengumpulan dana pinjaman. Ada beberapa nasabah yang memang rajin membayar angsuran sampai lunas, sedangkan sisanya berhenti membayar di pertengahan, bahkan ada yang tidak membayar sama sekali. Pengurus sering menemukan nasabah yang tidak mau membayar dan menolak jika diminta dengan berbagai alasan. Permasalahan ini berkaitan juga dengan slip angsuran, dimana terjadi kekeliruan antara laporan keuangan dan pengakuan nasabah. Laporan keuangan menunjukkan bahwa beberapa nasabah masih memiliki tanggungan, tetapi pihak yang bersangkutan merasa bahwa mereka sudah membayar angsuran pinjaman, meskipun mereka tidak memiliki bukti atau slip.

Beberapa solusi yang pernah diusulkan sebagai upaya pemecahan masalah ini adalah rencana pengiriman surat peringatan kepada nasabah dan bantuan pengawalan oleh tentara dalam proses penagihan sebagai bentuk tindakan tegas. Namun, sampai saat ini kedua usulan tersebut tidak pernah

teralisasi karena kesibukan masing-masing pengurus PUAP dan eratnya rasa “persaudaraan” yang juga menimbulkan rasa sungkan dari para pengurus kepada para nasabah. Sulitnya penyelesaian masalah oleh para pengurus ini juga disebabkan karena mereka merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Pengurus merasa bahwa pekerjaan yang memecahkan masalah PUAP yang rumit, mulai dari menagih angsuran ke banyak orang, sampai memperhitungkan uang senilai Rp 100.000.0000 terasa cukup berat apalagi tidak diberikan honor yang sepadan. Pengalaman lain yang sebetulnya diluar dari kewenangan lembaga permodalan, juga turut memengaruhi pandangan petani. Contohnya seperti yang sudah disebutkan perihal penggunaan bantuan dana KWT untuk pengembangan rumah bibit tidak optimal.

Fenomena yang telah dialami oleh para petani membuat mereka tidak lagi berharap pada lembaga serupa kedepannya. Hal ini didukung oleh Diwyarthi *et al.*, (2022), yang menyatakan bahwa seorang individu akan sukar untuk menerima hal-hal baru, apabila mereka memiliki pandangan atau persepsi tentang sesuatu yang telah diterima dalam jangka waktu panjang. Petani di Desa Koripan lebih mengharapkan bantuan dalam bentuk produk dibandingkan dengan peminjaman dana, seperti penambahan pupuk subsidi yang sekarang menjadi sangat langka. Tidak hanya itu, dukungan dalam penyaluran atau pemasaran produk pertanian juga sangat dibutuhkan, karena banyak petani yang kesulitan menjual hasil panen mereka dengan harga sesuai. Minimnya infrastruktur dan kurangnya informasi tentang permintaan pasar, tidak jarang membuat petani terpaksa menjual produk mereka kepada tengkulak dengan harga rendah, sehingga tidak mencukupi untuk modal biaya masa tanam selanjutnya. Menurut Maihani dan Elfiana (2016), petani terutama pada skala kecil menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertaniannya seperti kesinambungan produksi, fluktuasi pasar, rendahnya kualitas produk, kurangnya informasi pasar, ketidak jelasan jaringan pemasaran, dan lain sebagainya. BUMDes, sebagai entitas lokal yang dekat dengan masyarakat desa, memiliki potensi besar untuk menjadi mitra strategis dalam penyediaan pupuk subsidi, penyaluran hasil panen, dan pengelolaan program pelatihan bagi petani. Jika ada peran lebih aktif dari BUMDes, maka upaya meningkatkan kesejahteraan petani akan lebih menyeluruh dan berkelanjutan, serta membantu mengurangi persepsi negatif yang selama ini ada. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hafid dan Daryanto (2023) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki dampak positif karena dapat membantu masyarakat desa yang masih hidup di bawah kemiskinan dengan memberikan bantuan kredit, membuka peluang usaha, dan merencanakan kegiatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kepercayaan, pengalaman, sikap, dan pengharapan petani secara simultan dan parsial memengaruhi persepsi negatif terhadap lembaga permodalan di Desa Koripan. Keempat variabel ini saling terkait, di mana ketidakpercayaan sikap skeptis, dan rendahnya pengharapan terhadap lembaga permodalan menyebabkan petani menolak adanya inovasi serupa dan cenderung mempertahankan praktik lama yang dianggap lebih aman meskipun tidak optimal. Lembaga permodalan yang sampai saat ini masih menyediakan program pinjaman yaitu BRI KCP Matesih dalam program KUR dan BKAD Matesih dalam program SPKP, sedangkan lembaga PUAP sudah lama berhenti sejak tahun 2019 karena faktor internal dan eksternal.

Sebagai saran, lembaga permodalan disarankan untuk melakukan sosialisasi lebih luas kepada petani, termasuk seminar dan pelatihan yang mudah dipahami. Pengawasan keuangan harus ditingkatkan dengan melibatkan penyuluh setempat untuk memastikan transparansi dan mencegah penyelewengan. Selain itu, regenerasi anggota lembaga permodalan harus dilakukan dengan seleksi ketat dan pelatihan berkala. BUMDes juga diharapkan membangun program bantuan produk pertanian dan saluran pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani, serta bekerja sama dengan distributor untuk menciptakan jaringan pemasaran yang lebih stabil.

DAFTAR PUSTAKA

Aisah, A., & Wulandari, E. (2020). Persepsi petani kentang terhadap pelayanan kredit lembaga keuangan formal di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. *J. Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 4(4), 930–940.

- Apid, M., & Sumekar, W. (2022). Analisis faktor sosial ekonomi rumah tangga terhadap tingkat ketahanan pangan (kasus pada Gapoktan Tani Sejahtera Desa Ujunggebang Kabupaten Cirebon. *J. Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(3), 829–910.
- Asfiati, R. F., & Sugiarti, T. (2021). Motivasi petani dalam usaha tani pembibitan padi (studi kasus di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro). *J. Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 5(3), 735–747.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kecamatan Matesih Dalam Angka 2023*.
- Deviyanti, G., & Wulandari, E. (2022). Faktor-faktor yang berhubungan dengan penentuan sumber pembiayaan pada petani wortel di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. *J. Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 6(2), 590–601.
- Diwyarthi, N. D. M. S., Darmiati, M., Jalal, N. M., Fakhri, N. M., Supriyadi, A., Nurkhayati, A., & Fakhri, N. (2022). *Psikologi Umum*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Erliaristi, M., Prayoga, K., & Mariyono, J. (2022). Persepsi Pemuda Terhadap Profesi Petani Padi Di Kota Semarang Youth Perceptions On The Profession Of Farmers In Semarang City. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 8(2), 1387–1408.
- Fardisi, F., Prayoga, K., & Prasetyo, A. S. (2023). Komparasi Persepsi Petani terhadap Eksistensi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 7(2), 833–847.
- Fatmasari, M., Restuhadi, F., & Yulida, R. (2015). Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku petani dalam menerima operasi pangan Riau Makmur di Sembilan Kabupaten se-Provinsi Riau. *J. SEPA*, 12(1), 29–41.
- Gusti, I. M., Gayatri, S., & Prasetyo, A. S. (2021). Pengaruh umur, tingkat pendidikan dan lama bertani terhadap pengetahuan petani tentang manfaat dan cara penggunaan kartu tani di Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung. *J. Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 209–221.
- Hafif, N., & Daryanto, D. (2023). Peran BUMDes terhadap pendapatan petani di Desa Karangsono Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. *J. Agri SosioEkonomi Unsrat.*, 19(3), 1451–1460.
- Karyani, T., & Akbar, U. (2016). Aksesibilitas petani mangga gedong gincu terhadap lembaga keuangan formal dan non-formal studi kasus Gapoktan Sami Mulya Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon. *J. Agribisnis Terpadu*, 9(2), 1–15.
- Kurniati, S. A. (2020). Pengaruh karakteristik petani dan kompetensi terhadap kinerja petani padi sawah di Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi. *J. Agribisnis*, 22(1), 82–94.
- Kurniawan, Y. (2020). Adaptation of the Era of Disruption in the Agricultural Sector to Realize the Welfare of Farmer Families. *Journal of Creativity Student*, 5(2), 187–208.
- Maihani, S., & Elfiana. (2016). Pemasaran produk pertanian berbasis agribisnis dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi pedesaan. *J. Lentera*, 16(18), 63–70.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Skema Kredit Sektor Produktif (Pertanian Dan Peternakan) Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Jakarta.
- Permatasari, A., & Rondhi, M. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi petani padi dalam mengikuti kemitraan di Indonesia. *J. Agribisnis Indonesia*, 10(1), 15–30.
- Prayoga, K., Nurfadillah, S., Butar, I. B., & Saragih, M. (2018). Membangun kesalingpercayaan dalam proses transfer informasi antara petani dan penyuluh pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 36(2), 143–158.
- Prayoga, K., Nurfadillah, S., & Riezky, A. M. (2020). Penguatan sistem pendidikan SDM dalam pembangunan pertanian: agribisnis di mata pemuda. *Jurnal AGRISEP Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 19(1), 53–67.
- Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo.
- Rahayu, L. (2015). Aksesibilitas petani bawang merah terhadap lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan. *Journal Of Agribusiness and Rural Development Research*, 1(1), 52–60.

- Satriawan, P. W., Sugiyanto, S., Kustanti, A., & Sawitri, B. (2024). Pengaruh karakteristik petani pada persepsi petani dalam pengembangan agrowisata “Bon Deso”, Kota Batu. *J. Ilmu Pertanian Indonesia*, 29(1), 133–142.
- Syarifuddin, & Saudi, A. I. (2022). *Metode Riset Praktis Regresi Berganda Menggunakan SPSS*. Palangkaraya: Bobby Digital Center.